



Umer Chapra's Critique of The Western Concept of Welfare State

Khoirul Umam

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

khoirulumam@unida.gontor.ac.id

Achmad Jalaludin

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

achmadjalaludin42002@mhs.unida.gontor.ac.id

Received: May 25, 2023, Revised: June 28, 2023

Accepted: June 29, 2023 Published: July 03, 2023

Abstract: *This study aims to dissect Chapra's critique of the Western concept of welfare state, and his thoughts on welfare state in Islam in order to solve the problem of impasse in the thinking of modern economists. This research provides enlightenment on how the concept of welfare state is actually in Islam through the idea of Umer Chapra. The relevance of his thoughts is juxtaposed with the current state of the Indonesian state. This research is expected to be a strong reference for academics and practitioners in addressing the concept of welfare state. The method in this study uses a qualitative approach with a library research model. Data is obtained from various sources, such as Umer Chapra's master book in the discussion of welfare states, journals, or news info from newspapers. The results of the study show that Umer Chapra's criticism is very comprehensive. Chapra focused in his mind on the Islamic worldview, economic strategy, and welfare state goals. Islamic values are instilled in the strategy of regulating the country's economy. As for its relevance to the state of Indonesia, the results of the analysis show that Chapra's criticism of the welfare state and his thoughts are still relevant to the current state of Indonesia.*

Keywords: *Welfare state, criticism, Umer Chapra, thought.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk membedah kritik Chapra terhadap konsep welfare state Barat, dan pemikirannya tentang welfare state dalam Islam dalam rangka memecahkan masalah kebuntuan dalam pemikiran para ekonom modern. Penelitian ini memberikan pencerahan bagaimana konsep welfare state sebenarnya dalam Islam melalui gagasan Umer Chapra. Relevansi pemikirannya disandingkan dengan keadaan negara Indonesia akhir-akhir ini. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi kuat bagi akademisi maupun praktisi dalam menyikapi konsep welfare state. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model library research. Data didapat dari berbagai sumber, seperti buku induk Umer Chapra dalam pembahasan welfare state, jurnal, atau info berita dari surat kabar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kritik Umer Chapra sangat komprehensif. Chapra berfokus dalam pikirannya pada worldview Islam, strategi ekonomi, serta tujuan welfare state. Nilai-nilai keislaman ditanamkan dalam strategi mengatur ekonomi negara. Adapun relevansinya dengan keadaan negara Indonesia, hasil analisis menunjukkan bahwa kritik Chapra terhadap welfare state dan pemikirannya masih relevan dengan keadaan Indonesia akhir-akhir ini.*

Kata Kunci: *Welfare state, kritik, Umer Chapra, pemikiran.*

A. Pendahuluan

Dalam dunia pemikiran konsep ekonomi, akhir-akhir ini ramai pembahasan yang mengkaji tentang konsep kesejahteraan suatu negara atau dikenal dengan istilah *welfare state*. Kapitalis secara umum memandang bahwa masyarakat suatu negara akan makmur dan sejahtera dengan sendirinya¹, tanpa bantuan dan intervensi negara. Sementara sosialis, memandang bahwa teori kapitalis membawa kemunduran dan tidak relevan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi. Sehingga sosialis lebih cenderung kepada pemikiran bahwa pasar ekonomi perlu diatur oleh pihak yang berwenang, yang berada di posisi atas, sehingga tidak terjadi kebebasan yang keterlaluan.² Pembahasan dua falsafah ekonomi Barat ini terus-menerus menjadi momok bagi tiap-tiap negara yang mencoba untuk memakai teori salah satu dari keduanya. Karena memang pada kenyataannya belum ada kecocokan yang sepenuhnya menyatakan bahwa kapitalis atau sosialis adalah teori yang membawa kepada tujuan yang diinginkan. Ini menunjukkan buntunya pemikiran dalam kalangan para ekonom secara umum.

Lambat laun muncul seorang tokoh pemikir ekonomi Islam yang berani menggagas pemikiran atas gejala yang terjadi akibat benturan teori kapitalis dan sosialis. Seorang ekonom muslim bernama Muhammad Umar Chapra. Ia merupakan seorang pelopor dan penggagas ekonomi Islam kontemporer.³ Yang menarik, ia telah merumuskan suatu pemikiran besar atas gagalnya dua sistem ekonomi Barat yang dikenal yakni kapitalisme dan sosialisme. Hasil dari penelitiannya dari dua sistem tadi, kemudian disandingkan dengan teori ekonomi Islam dan munculah *welfare state* versi Chapra. Ia menjelaskan detail masing-masing teori Barat lengkap dengan data yang valid dari lapangan (berbagai

¹ Muhammad Kambali, "Paradigma Sistem Kapitalisme Dan Islam Tentang Welfare State," *JES, Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2019): hlm. 36.

² Muhammad Yusuf Ibrahim, *Buku Hitam Putih Ekonomi Islam*, ed. Muhammad Yusuf Ibrahim and Rendra Fahrurrozie (Bandung: Gulali Edukasi Indonesia, 2021), hlm. 200.

³ Mohammad Zaki Su'aidi, "Pemikiran m. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam," *Ishraqi* 10, no. 156 (2012): hlm. 4.

perkembangan ekonomi negara Barat). Ini merupakan hasil olahan dan renungannya panjangnya selama satu dekade.⁴

Telah ada beberapa penelitian terdahulu mengenai konsep *welfare state*. Namun, dari beberapa penelitian tersebut terlihat bahwa konsep *welfare state* yang dikaji adalah konsep yang masih umum. Korelasinya masih kepada teori Barat dan tidak nampak kritik di dalamnya. Seperti apa yang sudah ditulis oleh Muh. Hanif, tulisannya lebih menyusun korelasi antara *welfare state* dengan sertifikasi guru,⁵ adapun Alfitri, dalam tulisannya konsep *welfare state* Barat justru diposisikan sebagai landasan teori dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian Winda juga membelum membawa konsep Islam dalam tulisannya yang berjudul konsep *Welfare State* di Indonesia.⁶ Oleh sebab itu, sampai saat ini belum ada gambaran yang utuh mengenai konsep *welfare state* yang bernilai Islam, seluruhnya masih bernuansa Barat, bersifat umum, dan konvensional.

Dari sini, penulis tertarik untuk mengeruk kritik Chapra terhadap konsep *welfare state* Barat, dan menuntaskan bagaimana konsep *welfare state* sebenarnya dalam Islam menurut pandangannya. Konsep Chapra ini akan dicoba untuk dicarikan relevansinya dengan keadaan negara Indonesia akhir-akhir ini. Singkatnya, penulis ingin menggaungkan gagasan Chapra dalam konsep *welfare state* yang dinilai sangat komprehensif. Sehingga diharapkan adanya suatu referensi kuat bagi akademisi maupun praktisi dalam menyikapi konsep *welfare state*.

B. Kajian Pustaka

I. Biografi M. Umer Chapra

Muhammad Umar Chapra, atau akrab dengan panggilan Chapra, merupakan seorang pencetus dan penggagas pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Dilahirkan di Pakistan tanggal 1 Februari 1933. Bapaknya adalah

⁴ Muhammad Ridha, "Inflasi Dalam Pandangan Umer Chapra" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm. 46, <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7028>.

⁵ Muh. Hanif, "Sertifikasi Guru; Ideologi Kapitalisme Dan Welfare State," *Insania* 17, no. 1 (2012): 35–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/insania.v17i1.1486>.

⁶ Winda Roselina Effendi, "Konsep Welfare State Di Indonesia," *Trias Politika* 1, no. 1 (2017): 171–83.

Abdul Karim Chapra. Keluarganya terkenal agamis, karena itu ia tumbuh berkembang menjadi seorang yang mempunyai karakter baik. Selain sebagai ekonom Muslim yang aktif dalam bidangnya, Chapra juga memahami Islam dalam syariatnya secara lengkap. Ide dan gagasannya cemerlang, praktis, tidak hanya dalam teori yang dibukukan dan tidak hanya sebagai hayalan belaka. Wajar jika banyak praktisi dan akademisi ekonom muslim yang takjub kepadanya.⁷

Umer Chapra sempat menghabiskan masa pendidikan strata satu, kemudian lanjut magister di Karachi, Pakistan. Lalu aktif di lembaga *Central Institute of Islamic Research* kurang lebih dua tahun guna meneliti kajian-kajian terhadap berbagai ide dan prinsip-prinsip tradisi Islam, dan memunculkan sistem ekonomi Islam yang ideal. Sebelum aktif di lembaga tadi, Chapra menyelesaikan tahap pendidikan Ph.D. pada bidang ekonomi di tahun 1961 dengan meraih predikat cumlaude di Universitas Minnesota, Amerika Serikat. Dia tuliskan hasil kajiannya, kemudian dibukukan berjudul *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature*. Lainnya, Chapra berposisi sebagai ekonom senior dan *Associate Editor* di *Pakistan Development Review*.⁸

Karya Chapra pun cukup banyak, inovatif, dan menarik. Jumlah tulisannya sebanyak dua belas buku, enam puluh karya ilmiah, serta sembilan resensi buku, serta masih banyak lagi artikel di bermacam jurnal, juga media massa. Banyak juga hasil karyanya yang berterjemahkan bahasa Indonesia.⁹

Beberapa karyanya yang fenomenal adalah sebagai berikut:

- I. Buku dengan judul *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature*. Lalu yang kedua dari buku ini adalah buku tentang moneter yakni

⁷ Zaki Su'aidi, "Pemikiran m. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam," hlm. 4.

⁸ Dedi Mulyadi, "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisis Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, Dan Negara Sejahtera)," *'Adliya* 10, no. 2 (2016): hlm. 171.

⁹ Muhammad Ridha and Muhammad Yafiz, "Inflasi Berdasarkan Pandangan M. Umer Chapra," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): hlm. 128, <https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4089>.

Sistem Moneter Islam yang merupakan buku keduanya yang terbit pada tahun 1985.

2. Penelitian Chapra yang mengkaji tiga pemikiran konsep ekonomi Barat, meliputi sistem kapitalisme, sosialisme, dan hasil gabungan dari dua sistem tersebut yang dikenal dengan *welfare state*. Ia mengemukakan neraca perbandingan ketiga sistem tersebut dari segi beberapa prestasi dan kegagalannya. Buku ini bernama Islam dan Tantangan Ekonomi.
3. Buku berjudul Islam dan Pembangunan Ekonomi. Buku ini memiliki lima latar belakang. Pertama, perihal pembangunan yang diperhatikan oleh Islam. Kedua dan ketiga, apakah jenis pembangunan ini bisa berjalan dengan pendekatan sekuler yang menganut sistem pasar yang dirumuskan oleh para ekonom pembangunan dalam konsep kerja dua sistem tersebut. Keempat, mengenai konsep Islam di dalam pembangunan ekonomi. Apakah dapat membantu berbagai negara muslim dalam menyusun konsep aktualisasi pembangunan yang diharapkan oleh Islam guna mensolusikan ketidakseimbangan makro ekonomi? Terakhir, Apa sebab gagalnya rumusan dan implementasi strategi tersebut?

2. Makna *Welfare State* dalam Islam Menurut Pandangan Umer Chapra

Menurut Chapra, *welfare state* pada sistem ekonomi Islam adalah rancangan yang mengatur kebijakan skala makro dalam melaksanakan beberapa fungsi negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Setidaknya ada tiga hal penting yang diusulkan Chapra dalam pemikirannya, yaitu:¹⁰

a. *Worldview Islam*

Pentingnya ajaran Islam sebagai otoritas serta organisasi memiliki pengaruh terhadap para tokoh muslim dunia pada pola pikir politik mereka. Chapra memberikan contoh dalam hal ini. Yakni tokoh-tokoh muslim dunia semisal Abu Ya`la juga Al-Mawardi. Keduanya menerangkan bahwa

¹⁰ Muhammad Umar Chapra, *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy* (Leicester: The Islamic Foundation, n.d.), hlm. 2.

karakteristik suatu negara yang menjadi panutan adalah negara yang menjalankan kedaulatan, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Lanjut Chapra, Al-Mawardi menjelaskan bahwa keberadaan pemimpin sama pentingnya ketika membela suatu kebenaran dan mengakuisisi ilmu pengetahuan. Juga Ibnu Khaldun tuturnya, ditekankan bahwa model kelembagaan di negara tertentu merupakan kewajiban yang penting sekali ditegakkan, juga dikelola oleh setiap muslim. Ini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taymiyah, Syah Waliyullah, juga tokoh-tokoh Muslim di dunia.¹¹

Selanjutnya, berbagai nilai spiritual Islam diimplementasikan kepada sendi masing-masing individu dalam masyarakat, negara harus berupaya pada tiga pedoman besar. Pertama, pengembangan negara terhadap kondusifitas demi mewujudkan keadaan lingkungan rumah yang peduli dan setia terhadap segala moral Islam di generasi yang akan datang. Kedua, negara mesti membentuk sistem pendidikan Islam sehingga lembaga pendidikan mampu membentuk generasi yang mempunyai idealisme Islam. Ketiga, negara mestinya menjadikan segala norma dan nilai Islam tersebut sebagai aturan perundang-undangan dan menyusun aturan yang mampu menghukum seluruh pelanggaran sampai dapat mengawal dan mencegah pelanggaran.¹²

Pada akhirnya, secara umum menurut Chpara, apa yang dibutuhkan sekarang adalah reformasi menyeluruh dari struktur sosio-ekonomi dan nilai-nilai kehidupan di mana kapitalisme atau versi reformasinya, *welfare state* didasarkan. Ini juga akan membantu memecahkan sejumlah masalah sosial

¹¹ Umar Chapra, *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy*.

¹² Umar Chapra, hlm. 6.

lainnya, termasuk pengangguran, ketidakstabilan ekonomi, kerusakan sosial dan kejahatan.¹³

b. Strategi Ekonomi

Menurut Chapra, ada dua prinsip utama dalam pemanfaatan sumber daya. Pertama, sumber daya yang telah dianugrahi oleh Allah SWT berlaku bagi seluruh umat manusia juga tidak ada pengecualian serta perbedaan di dalam kelompok tertentu. Kedua, sumber daya tadi ditujukan untuk masalah kesejahteraan umat manusia keseluruhan, paling tidak dalam upaya untuk memperkecil data kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar setiap manusia.¹⁴

Dalam menjalankan fungsi ekonomi, Chapra menyoroti juga masalah stabilitas uang riil. Menurutnya, di antara cara yang tepat dan mampu memperkecil tingkat inflasi yakni dengan memantau sebaik mungkin harga, juga bantuan di bahan makanan dan beberapa barang pokok yang dikonsumsi.¹⁵

Adapun hubungannya dengan negara, Chapra menyatakan beberapa prinsip strategi kebijakan hubungan internasional. Pertama, bersikap kooperatif kepada seluruh kontribusi kesolehan, dan menjaga diri dari pada berbuat dosa. Kedua, bekerja dengan baik bagi kesejahteraan umat manusia karena semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Kedua hal tersebut yang mesti ada dalam hubungan berbagai negara, juga masyarakat dalam negara Islam dengan segala tanggung jawab yang global. Seluruh negara Islam mempunyai tanggung jawab besar untuk memperjuangkan ideologi keislamannya, *ukhuwwah*, wibawa umat, dan keagungan Islam perlu ditingkatkan. Setiap negara juga sangat bertanggung jawab atas penyampaian misi perdamaian, juga pertahanan.¹⁶

¹³ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Riyadh: International Islamic Publishing House, 1995), hlm. 137.

¹⁴ Umer Chapra, hlm. 6-7.

¹⁵ Umer Chapra, hlm. 12.

¹⁶ Umer Chapra, hlm. 18.

Dalam strategi mewujudkan prinsip keadilan, berbagai sumber daya yang melimpah pada suatu negara bisa dikelompokkan kepada zakat, pemasukan yang berasal dari pajak, sumber daya alam, juga pinjaman luar negeri. Zakat menjadi sebagian dari instrumen yang dibutuhkan dalam menata jaminan perlindungan sosial manusia. Namun, ada yang menyebutkan bahwa apabila zakat diperkenalkan, karena itu semua pengaturan jaminan sosial tidak dibutuhkan lagi. Asumsi ini kurang tepat, sebab zakat bukan instrumen satu-satunya dari jenis pembiayaan berdikari yang disusun oleh masyarakat modern guna menyuguhkan perlindungan asuransi. Zakat salah satu alat bantu sosial mandiri, juga sebagai kewajiban moral bagi orang yang kaya untuk menolong kaum miskin yang diabaikan. Zakat tetap tidak mengenyampingkan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan, melainkan sebatas membantu untuk menciptakan sebuah tanggung jawab sosial ke masyarakat.¹⁷

Unsur keadilan sosial-ekonomi, pemerataan penghasilan kepada yang berhak, juga kesejahteraan merupakan satu kesatuan yang erat dalam Islam yang didasarkan pada konsep keadilan dan *ukhuwwah islamiyyah*.¹⁸ Oleh karena itu, Islam sangat menekankan unsur keadilan dalam distribusi dan mengumpulkannya ke dalam beberapa agenda untuk distribusi ulang penghasilan dan kesejahteraan sehingga setiap orang standar hidupnya bisa terjamin. Keadilan tersebut harus disinkronkan dengan kontribusi seseorang kepada negara. Berkaitan dengan ini, Islam sangatlah toleran dan memahami akan ketidaksamaan pendapatan karena semua manusia diciptakan tidak sama dalam karakter, bakat, dan jasanya kepada negara.¹⁹

Jenis sumber daya yang lainnya yakni penghasilan dari sumber daya alam itu sendiri yang mesti digunakan untuk kepentingan semua penduduk,

¹⁷ Ariza Fuadi and Purbayu Budi Santosa, "EKONOMI ISLAM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 12, no. 1 (2015): hlm. 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jdeb.v12i1.255>.

¹⁸ Fuadi and Budi Santosa, hlm. 13.

¹⁹ Umar Chapra, *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy*, hlm. 14.

sedangkan negara wajib mengatur semua pendapatan tersebut tanpa dicurangi menggunakan nama individu, juga kelompok. Selain itu, pajak sebagai sumber daya yang lain mesti dirancang dengan modern. Pencukupan kebutuhan infrastruktur sosial dan fiskal secara besar, percepatan pembangunan akan dapat terealisasi dengan baik dengan sumber pendapatan pajak yang mencukupi. Kemudian sumber dari pinjaman luar negeri, untuk semua negara muslim yakni di saat terjadi defisit fiskal. Keempat jenis kategori persediaan inilah yang diperlukan oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya.²⁰

c. Tujuan-tujuan *Welfare State* (Goals)

Melihat dari kegagalan sistem dari *welfare state*, Chapra memberikan penegasan, bahwa kewajiban negara Islam untuk menciptakan negara yang sejahtera adalah mewujudkan standar hidup yang layak untuk rakyatnya dan menolong mereka yang kurang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi Islam dalam memahami pemerataan pendapatan kekayaan tidak berlaku bagi kepemilikan semua orang. Ini karena Islam mengakui adanya keniscayaan perbedaan yang dibatasi oleh hak masyarakat miskin dengan ibadah zakat. Dengan kewajiban tersebut, maka negara juga memerlukan sumber-sumber penghasilan. Sumber-sumber tersebut di antaranya: zakat, penghasilan sumber daya alam, pajak serta pinjaman.²¹

Dengan landasan terminologis, Chapra sangat berfokus pada makna sejahtera dalam konteks ekonomi. 'Sejahtera' menurutnya bukan bermakna 'yang kaya' tetapi orang 'yang ideal', yakni keadaan yang seimbang antara keadaan material dan spiritual yang didapatkan dari beberapa sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, negara Islam bisa disebut sebagai negara yang sejahtera atau ideal apabila kesakralan moral dan batin warga masyarakat meningkat, segala bentuk kewajiban masyarakat sebagai *khalifah* di muka bumi terhadap sumber

²⁰ Umar Chapra, hlm. 19-20.

²¹ Anindya Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra," *Profetika, Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): hlm. 172.

daya alam dilaksanakan, dan tegaknya keadilan serta terhapusnya kezaliman. *Welfare state* menurut Islam, bukanlah negara kapitalis ataupun sosialis, akan tetapi negara dengan konsep Islam dan kehidupan yang Islami.²² Ini tujuan akhir dari pada *welfare state*.

C. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bermodelkan kepustakaan (*library research*); di mana data serta bahan penelitian yang didapatkan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, seperti buku, makalah, jurnal yang berkenaan dengan kajian *Welfare State* dan kajian pemikiran Umer Chapra. Dengan ini peneliti dapat menyusun bagaimana Umer Chapra mengkritisi konsep *Welfare State*.²³ Adapun untuk analisisnya, penelitian ini menggunakan metode Miles & Huberman. Dalam analisis ini, ada tiga model kegiatan, yaitu reduksi data, display data, dan konklusi. Pertama, meringkas, memilih beberapa hal pokok, menaruh faokus pada beberapa hal yang penting, mencari tema seputar *Welfare State*, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Kedua, tahap menyusun uraian/deskripsi, kolom, hubungan antara suatu kategori dan sejenisnya. Dan selanjutnya, menarik kesimpulan dari apa yang sudah tersusun.

D. Hasil dan Pembahasan

I. Paradigma *Welfare State* Barat

Welfare state secara umum memiliki makna usaha negara menuju kesejahteraan umum. Negara dalam hal ini dijadikan tumpuan utama, media, alat, untuk tercapainya kemakmuran bersama dan keadilan sosial bagi warga negara tertentu. *Welfare State* dalam penerapannya di lapisan masyarakat berlaku

²² Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra."

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi U.G.M., 1984), hlm. 9.

menyeluruh di setiap tingkatan kalangan sosial.²⁴ Inilah makna dasar sebelum nantinya dikaitkan dengan hal ekonomi.

Dalam kapitalisme welfare state lahir dari teori Adam Smith yang dikenal dengan invisible hand, yang artinya kebebasan individu. Dimana manusia bisa saling tolong-menolong dalam perekonomian dengan modal tertentu tanpa campur tangan negara. Negara hanya diberi wewenang dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan, keadilan, serta sarana prasarana lembaga-lembaga tertentu.²⁵

Peranan negara dalam lingkup khususnya, Adam Smith menuangkan konsep kebebasan ini dalam mekanisme pasar dengan bukunya *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations*. Basis filologisnya adalah laissez-faire/laissez-passer. Dalam bukunya *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations*, Adam Smith menuangkan konsep ini dalam sistem pasar. Dasar filologisnya adalah *laissez-faire/laissez-passer*. Dimana setiap individu bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi, apapun yang diinginkannya. Prinsip kebebasan ini bertujuan sebagai efisiensi yang baik dalam kegiatan ekonomi negara dan dalam jangka yang lama ke masa depan. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.²⁶ Demikian perkembangan paradigma *welfare state* dalam kapitalisme, yang akhirnya akan disusul dengan gagasan sosialis.²⁷

Welfare state mendapat momentum sehabis depresi lama yang terjadi ketika tahun 1930 di Amerika sekaligus bantuk respon kepada tantangan kapitalisme dan kesukaran dalam ekonomi yang disebabkan oleh depresi dan perang. *Welfare state* ini memberikan kritik kepada paham yang mengatakan bahwa peran negara dominan lebih aktif dalam bidang ekonomi dibandingkan peranannya di bawah kapitalisme *laissez-faire*. Namun, walaupun tujuan welfare

²⁴ Hanif, "Sertifikasi Guru; Ideologi Kapitalisme Dan Welfare State," hlm. 43.

²⁵ Kambali, "Paradigma Sistem Kapitalisme Dan Islam Tentang Welfare State," hlm. 36.

²⁶ Ibrahim, *Buku Hitam Putih Ekonomi Islam*, hlm. 54.

²⁷ Ibrahim, hlm. 52.

state mengandung aspek kemanusiaan, hal itu tidak bisa membangun strategi yang efektif untuk mencapai tujuannya. Masalah ini muncul karena *welfare state* menghadapi kekurangan sumber daya sebagaimana yang dihadapi oleh beberapa negara lain. Apabila *welfare state* meningkatkan pemanfaatannya atau sumber daya itu fokus dalam pelayanan kesejahteraan, ia harus mengurangi pemanfaatan lain ke atas sumber-sumber daya.²⁸ Ini merupakan 'gerakan manajemen sosial' dari atas yang bermaksud untuk memastikan tatanan sosial tanpa transfer kekuasaan penting dari strata yang berkuasa ke mayoritas bawahan.²⁹

Pandangan Smith tersebut disanggah oleh para pemikir dari aliran sosialisme, terutama Karl Marx. Sebaliknya, pemikir sosialis lebih beranggapan bahwa perekomonian mesti direncanakan, dan dimonitoring secara ketat oleh pemerintah atau negara.³⁰ Sosialisme melihat realita begitu sistem pasar bebas sebagai instrumen pada perekonomian kapitalisme tidak mendatangkan kesejahteraan seperti teori Adam Smith, melainkan memicu kesenjangan sosial yang tergambarkan pada hubungan produksi dengan tenaga produktif itu sendiri, yakni adanya eksploitasi. Maka dari itu, Karl Marx membuat pernyataan bahwa kesejahteraan akan muncul ketika kepemilikan pribadi dihapuskan dan diganti sistem kepemilikan oleh bersama yang ada dalam sistem sosialisme-komunisme.³¹ Selanjutnya pendapat lain dari sosialis akan menguatkan pendapat ini.

Terdapat pendapat lain dari kalangan sosialis, yakni John Maynard Keynes. Menurutnya, *welfare state* dibentuk dengan maksud yakni menggapai segi *full employment*. Keynes mendorong pemerintah supaya mengedepankan pengaturan kebijakan fiskal. Tapi Keynes tidak memberi gagasan atau pendapat mengenai bagaimana kriteria untuk mengalokasikan pengeluaran sektor publik

²⁸ Zaki Su'aidi, "Pemikiran m. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam," hlm. 6.

²⁹ Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, hlm. 113.

³⁰ Ibrahim, *Buku Hitam Putih Ekonomi Islam*, hlm. 200.

³¹ Kambali, "Paradigma Sistem Kapitalisme Dan Islam Tentang Welfare State," hlm. 35.

sebagai hal utama yang wajib dipenuhi. Faktor *full employment* ini adalah gambaran kritik Keynes terhadap teori Adam Smith bahwa *full employment* dijamin secara otomatis (*invisible hand*).³²

Filosofi yang menjadi dasar menunjukkan gerakan menjauh dari berbagai prinsip sosial-darwinis kapitalisme *laissez-faire* yakni keyakinan bahwa kesejahteraan individu terlalu penting, tujuan yang harus diserahkan hanya untuk operasi kekuatan pasar. Filosofi ini menyiratkan pengakuan formal oleh ekonomi arus utama (*mainstream economics*) bahwa kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri belum tentu merupakan bukti kegagalan pribadi. Pekerja mungkin dibayar rendah, menganggurnya seseorang bukan karena kesalahannya sendiri. Oleh karena itu, perlu untuk menjamin setiap anggota perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial termasuk kecelakaan industri, cacat dan pengangguran, dan untuk menyediakan layanan sosial seperti pendidikan, perumahan, perawatan medis dan transportasi umum, yang penting untuk fungsi efektif individu dalam masyarakat modern tetapi yang mungkin tidak dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki sarana terbatas. Filosofi ini juga mengakui sepenuhnya pekerjaan, dan distribusi penghasilan, juga kekayaan yang adil di antara tujuan penting kebijakan negara. Ini menyerukan memainkan peran yang jauh lebih aktif oleh negara dalam perekonomian daripada yang diizinkan di bawah *laissez-faire* kapitalis.³³

Sistem yang tidak mampu menahan arus inflasi, pengangguran dan hutang ke luar negeri yang semakin meningkat setiap tahunnya. Negara-negara penganut konsep sosialis seperti Yugoslavia, Hungaria, Polandia dan Cina dan negara-negara lainnya, belum berhasil memecahkan berbagai masalah ekonomi negara yang semakin hari semakin memburuk. Sosialisme demokrat umumnya disandingkan

³² Fuadi and Budi Santosa, "EKONOMI ISLAM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)," hlm. 8.

³³ Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, hlm. 130.

dengan *welfare state* dan penekanan pada demokrasi ekonomi dan politik digabung dengan regulasi dan nasionalisasi para industri, perubahan bidang perburuhan, dan layanan kesejahteraan seperti sumbangan bagi yang menganggur, pendidikan subsidi, kesehatan serta jaminan kesejahteraan dan pelayanan transportasi. Di lain sisi, *goal* utama dari *welfare state* ini adalah pengurangan tingkat kemiskinan, penyediaan program sosial dari negara, pemerataan kekayaan yang lebih tepat, peluang kerja penuh dan penguatan ekonomi. Akhirnya, meskipun kekayaan ekonomi cukup besar, tapi tingkat kemiskinan masih saja ada, tidak seimbang dan ketidakstabilan ekonomi terus meningkat bersama kesenjangan penghasilan dan resiko lainnya yang tidak baik dalam perekonomian.³⁴

2. Analisa Umer Chapra terhadap Sistem *Welfare State* Barat

a. Aspek Regulasi

Tidak dipungkiri bahwa regulasi yang berlaku di berbagai perusahaan swasta sangat diperlukan demi terjaminnya persaingan, terjaganya tatanan, dan perlindungan atas semua hak orang lain. Akan tetapi, regulasi ini menuntut kriteria yang disepakati oleh beberapa nilai kolektif, artinya jika kriteria dan nilai tersebut tersedia atau secara universal tidak diakui, maka dalam masyarakat pluralis pandangannya di mana setiap orang mengedepankan kepentingan egonya saja, negara menjadi sebuah papan netral bagi semua kelompok yang berkepentingan, dan segala aktivitasnya cuma akan menjadi sasaran transaksi dan kompetisi politik. Jadi, regulasi apapun yang ditegakkan dengan ditunggangi unsur politik, terkesan akan menjadi tumpul atau sirna oleh perubahan politik.³⁵

Peraturan tanpa adanya nilai-nilai yang disepakati secara sosial pasti akan menguntungkan satu atau kelompok lain. Ada kecenderungan untuk

³⁴ Anindya Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2013): hlm. 12-13.

³⁵ Mulyadi, "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisa Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, Dan Negara Sejahtera)," hlm. 176.

mengatur tergantung pada kelompok tekanan mana yang berada di atas politik (kekuasaan). Ini karena kekuatan dan sumber daya ekonomi dan organisasi yang dimiliki berbagai partai atau kelompok tidak didistribusikan secara merata, mereka tidak saling mengimbangi. Hasilnya, peraturan yang ada dalam hal ini, cenderung menguntungkan orang kaya dan berkuasa saja karena mereka akan menggunakan sumber daya mereka untuk mengendalikan media berita, dan untuk membiayai kampanye pemilihan dan lobi agresif, untuk memiliki peraturan yang tidak relevan yang mendukung mereka.³⁶

Selain itu, meskipun peraturan atau regulasi dirangkai dengan bingkai hukum, serta kekuatan koersif³⁷ pemerintah, mungkin juga tidak cukup untuk menegakkan peraturan secara efektif. Peran faktor pendidikan dan transfer moral antar masyarakat ini mendorong motivasi yang kuat. Kecuali mungkin jika ada dorongan batin dari pihak individu untuk mematuhi peraturan dengan sungguh-sungguh. Apalagi ada usaha yang dilakukan untuk menghindari peraturan dan memanfaatkan kesempatan yang ada, dan pasti ada dalam semua peraturan. Oleh sebab itu, harapan bahwa peraturan seimbang yang dirancang untuk keadilan sosial-ekonomi hanya angan-angan. Peraturan dan nilai-nilai yang disepakati secara sosial dan motivasi di antara semua kelas sosial untuk mengorbankan kepentingan diri mereka guna mewujudkan tujuan-tujuan ini. Kedua kekuatan ini ditolak oleh sekularisme dalam kapitalisme, yang mana menjadi pilar utama sebagai bangunan welfare state terletak.³⁸

b. Nasionalisasi

Program nasionalisasi berbagai industri besar telah kehilangan momentumnya. Sebabnya bukan saja karena kemunduran kinerja berbagai industri yang disebabkan oleh kekecewaan yang dinasionalisasi, tetapi juga

³⁶ Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, hlm. 115.

³⁷ KBBI: bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan, sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan yang lainnya.

³⁸ Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, hlm. 116.

karena melonjaknya bantuan yang diserap oleh industry tersebut untuk stabilisasi berlangsungnya hidup mereka, dan juga karena keterbatasan politik yang menjadi kendala untuk menentukan harga berdasarkan aktivitas pasar.³⁹

Masalah anggaran yang umumnya ditemui di mana-mana membuat sulit bagi para departemen keuangan publik untuk membiayai subsidi ini. Oleh karena itu, lebih dari sebagai masalah kebutuhan keuangan saja dan kurang sebagai masalah pilihan politik. Kini privatisasi telah menjadi tren di seluruh dunia dan mendapatkan momentum di bawah pemerintah dari persuasi berbagai arah.

Program privatisasi dari satu jenis atau lainnya adalah direncanakan atau sedang berlangsung di Eropa Barat dan antusiasme bahkan telah menyebar ke negara-negara dan wilayah sejauh Jepang, India, Amerika Latin. Chapra juga menjelaskan banyaknya negara yang beralih dari sietem nasionalisasi ke privatisasi. Ini karena keadaan politik yang sudah berubah, seperti partai buruh yang sudah tidak setia kepada nasionalisasi. Dan gerakan privatisasi kemungkinan akan mendapatkan momentum lebih lanjut dengan kegigihan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dan kendala anggaran yang dihadapi oleh pemerintah.⁴⁰

c. Gerakan Serikat Buruh

Aksi serikat buruh dianggap sebagai penawar bagi peningkatan penghasilan para buruh, perbaikan kondisi kerja mereka, dan penyediaan program keamanan ekonomi, kini telah kehilangan kesempatan efek dari adanya inflasi, juga pengangguran yang cukup tinggi. Gaji secara terus-menerus dinaikkan secara tidak adil, ini dianggap sebagai faktor inflasi karena dorongan ongkos, kekakuan upah umumnya dipandang sebagai penyebab utama

³⁹ Mulyadi, "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisi Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, Dan Negara Sejahtera)."

⁴⁰ Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, hlm. 117.

pengangguran. Akibatnya yang ditanggung, gerakan anti serikat buruh melonjak di berbagai negara industri dan serikat buruh terus mengalami penurunan.⁴¹

Setelah melihat gejala kemunduruan serikat buruh di beberapa negara, tampaknya tidak mungkin bahwa serikat buruh akan dapat untuk menjadi suatu terobosan besar di masa mendatang dalam menghadapi pengangguran, yang tampaknya akan berlanjut pada saat ini. Namun, bukan hanya pengangguran yang harus disalahkan. Beberapa ekses serikat pekerja itu sendiri, didorong semata-mata karena pengejaran kepentingan diri yang 'tanpa hambatan' oleh anggota serikat buruh bersifat agresif juga lantang dan kurangnya perhatian mereka kepada akibat buruk dari kebijakan mereka terhadap kesejahteraan sosial, ini telah menjadi faktor penting dalam mengurangi dukungan yang mereka nikmati dari industrialis dan masyarakat luas.⁴²

Para industrialis telah menerima serikat buruh. Gerakan, Bukan harus karena kepercayaan mereka dalam keadilan sosial-ekonomi, melainkan karena kesadaran mereka sendiri bahwa serikat merupakan manfaat positif bagi sistem industri melalui kontribusi yang dapat mereka buat untuk hubungan manajemen kerja yang harmonis. Mereka menegosiasikan kontrak yang mengikat semua anggota, kontrak upah standar antara perusahaan industri yang bersaing, dan mereka menyetujui pemogokan hanya pada akhir kontrak. Dengan demikian mereka menambah stabilitas ekonomi yang begitu dibutuhkan untuk akumulasi modal dan peningkatan produksi. Namun, korupsi kepemimpinan serikat pekerja dan sejumlah besar pemogokan menyebabkan pecahnya kontrak sosial secara diam-diam antara industrialis dan serikat buruh. Pada akhirnya menghilangkan alasan di balik dukungan industrialis untuk serikat buruh. Contohnya pada tahun 1978, ada begitu

⁴¹ Mulyadi, "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisa Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, Dan Negara Sejahtera)."

⁴² Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, hlm. 118.

banyak pemogokan di Inggris sehingga mereka menonjolkan kesengsaraan publik dan bahkan mengubah sentimen publik terhadap mereka.⁴³

d. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal telah menjadi alat utama welfare state. Ini meliputi penggunaan pengeluaran publik, perpajakan yang diproses, serta pinjaman untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Pengeluaran publik harus tidak hanya untuk fungsi tradisional yang diakui oleh bahkan negara *laissez-faire* (pertahanan, administrasi publik dan layanan ekonomi), tetapi juga sebagai fungsi welfare state untuk mempromosikan pertumbuhan. Stabilitas ekonomi, dan kesetaraan pemasukan yang lebih tinggi. Dengan ekspansi berkelanjutan dalam tanggung jawab negara dalam mengejar sekian fungsi ini, telah terjadi peningkatan yang drastis dalam pengeluaran publik dan perpajakan selama lima puluh tahun terakhir, terkhusus karena kenaikan tajam dalam pengeluaran pertahanan dan pembayaran transfer. Yang terakhir ini menggabungkan beragam manfaat, termasuk hak jaminan sosial (seperti kompensasi pengangguran), hibah bantuan sosial (seperti tunjangan hari tua dan perawatan anak), subsidi (pada makanan dan utilitas publik), dan layanan publik (seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi umum, dan perumahan), yang tidak terbatas hanya untuk orang miskin, dan karena itu hal tersebut dilobi oleh setiap kelompok kepentingan.⁴⁴

e. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi

Beberapa keunggulan yang sebelumnya dibahas dari welfare state seluruhnya telah gagal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan ketidakadilan pendapatan dan kekayaan, strategi tingkat pertumbuhan yang tinggi tetap belum bernasib lebih baik. Pertumbuhan

⁴³ Umer Chapra, hlm. 117-119.

⁴⁴ Umer Chapra, hlm. 119-120.

ekonomi yang tinggi adalah satu-satunya alat dalam `suatu kotak` *welfare state* yang sepenuhnya sesuai dengan kendala yang dipaksakan sendiri agar tidak menilai atau membandingkan secara interpersonal. Sebab konsep *welfare state* mendapat momentum sehabis perang dunia kedua dengan background peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, kepercayaan yang besar ditempatkan dalam kemampuannya untuk mengarah pada masyarakat tanpa golongan sosial. Beberapa penasihat kebijakan terkemuka menganggap peningkatan yang lebih cepat adalah jawaban yang solutif untuk seluruh masalah di negara maju.⁴⁵

Namun, selama dua dekade tingkat pertumbuhan yang tak terduga tinggi dan terus meningkatnya kekayaan usai gagal menghilangkan kemiskinan, memenuhi keperluan dan mengurangi ketidaksetaraan. Bahkan di berbagai negara kaya di dunia, terlepas dari apakah kita melihat negara-negara yang kurang berorientasi pada kesejahteraan seperti Amerika Serikat dan Jepang atau negara-negara yang berorientasi pada kesejahteraan tinggi seperti Jerman Barat, Inggris, Dan Swedia, beberapa kebutuhan penting orang miskin terutama pendidikan, fasilitas medis dan perumahan tetap tidak terpenuhi. Selain itu, kenaikan fenomenal dalam volume barang dan jasa yang telah ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi belum dengan sendirinya berkontribusi pada peningkatan kebahagiaan manusia. Ada peningkatan manifestasi dari gejala apatis. Ketegangan berada di mana-mana lebih jelas daripada suasana yang harmonis, keadaan tidak proporsional lebih jelas daripada proporsional.⁴⁶

f. Lapangan Kerja yang Penuh

Tingkat pekerjaan tinggi yang merupakan cara penting untuk memperbaiki kondisi kemiskinan juga memburuk dengan faktor pengangguran. Ini menjadi salah satu masalah yang paling sulit dari semua industri bangsa barat. Pengangguran meningkat di Eropa pada tahun 1990. Tingkat inflasi

⁴⁵ Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*.

⁴⁶ Umer Chapra, hlm. 127-129.

akibat pengangguran perlahan juga telah meningkat tajam di semua negara industri utama sejak akhir 1960an. Bahkan, yang lebih mengkhawatirkan yakni bahwa tingkat pengangguran kaum muda yang lebih tinggi dari rata-rata. Keadaan itu melukai martabat mereka, menurunkan kepercayaan mereka di masa depan, meningkatkan rasa benci mereka terhadap masyarakat, dan merusak kapasitas pribadi dan kontribusi potensial mereka.⁴⁷

Inilah enam poin hasil analisa Chapra di beberapa negara Barat. Setelah dilihat, terdapat banyak sekali fenomena dan gerakan, serta data yang menunjukkan kemunduran, penurunan, dan kemerosotan dari sistem welfare state ini. Jadi, ternyata system ini memang tetap tidak efektif.

3. Kritik Umer Chapra terhadap Sistem *Welfare State*

Ketidakadilan yang dihasilkan oleh kapitalisme tidak dapat ditoleransi oleh perubahan besar yang dibawanya pada manusia terhadap ketidakadilan dan kesengsaraan. Yang bahkan selama tiga abad ini sekularisme tidak dapat dihancurkan. Meskipun sementara tujuannya adalah kemanusiaan, ia tidak dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mewujudkan tujuannya. Kalimat `kemanusiaan` yang ditawarkan tidak memperkenalkan perubahan mendasar dalam pandangan dunia atau strategi kapitalisme. Oleh karena itu, ia tidak memiliki mekanisme yang efektif dan sistem motivasi yang akan membantu mencegah penggunaan sumber daya yang langka untuk tujuan. Mesin produktif, dan semua lembaga kapitalis yang memainkan peran dominan dalam memperluas kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, terus berlanjut. Gagasan bahwa sistem pasar sekuler dengan sendirinya dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang "efisien" dan bahwa ketidakadilan yang diciptakan oleh pasar dapat dibatalkan oleh peran pemerintah yang aktif, tanpa bantuan penilaian nilai kolektif dan tanpa

⁴⁷ Umer Chapra, hlm. 129.

restrukturisasi ekonomi yang signifikan, telah terbukti bahwa ini hanya angan-angan.⁴⁸

Meskipun *welfare state* telah mengondisikan orang miskin di negara-negara industri dan masalah kemiskinan, kerugian masih ada. Kemiskinan sangat gigih dan bahkan kebutuhan penting orang miskin tetap tidak terpenuhi. Jarak antara yang makmur dan yang miskin semakin melebar. Tidak hanya dalam pemasukan riil, ini juga dalam akses keperawatan kesehatan, perumahan dan pendidikan tinggi. Dilema yang membingungkan adalah bahwa, meskipun menghabiskan sebagian besar produk domestik bruto (PDB)⁴⁹ untuk perawatan kesehatan, orang miskin dan yang tua tidak dapat mendapatkan perawatan yang cepat dan memadai. Mereka harus menunggu jangka waktu yang sangat lama untuk beberapa operasi yang sangat dibutuhkan, mulai dari operasi jantung hingga pengangkatan katarak. Harga farmasi tinggi dan lobi oleh industri farmasi telah menghalangi pemerintah untuk mendesak penggunaan yang lebih murah.⁵⁰

Di Amerika Serikat contohnya, ekonominya tidak stabil. sebagian besar perawatan kesehatan dibiayai secara pribadi, tiga puluh satu juta orang Amerika (tiga belas persen dari populasi) tidak memiliki asuransi kesehatan. Pasar perumahan telah diperketat untuk hampir semua orang, tetapi terutama untuk orang miskin. Hampir tidak ada rumah yang berada dalam jangkauan orang-orang yang benar-benar miskin. Oleh karena itu sebagian besar keluarga miskin menyewa, dan sewa telah meningkat lebih cepat daripada pendapatan dalam dekade terakhir. Paradoks yang lebih membingungkan adalah bahwa kondisi sosial-ekonomi yang berlaku tidak hanya melanggengkan orang miskin, mereka juga melanggengkan kemiskinan dalam keluarga, hanya sedikit orang yang dapat melepaskan dirinya dari lingkaran ini. Jutaan manusia di berbagai negara terkaya dan terkuat secara

⁴⁸ Umer Chapra, hlm. 130.

⁴⁹ Nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

⁵⁰ Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, hlm. 131.

ekonomi di dunia terjebak dalam permukiman golongan minoritas dalam suatu kota yang telah berubah dari buruk, kemudian menjadi lebih buruk meskipun penganut *welfare state*. Mereka telah menjadi mimpi buruk yang membingungkan dari anak-anak tanpa ayah, kejahatan, geng, narkoba dan keputusan.⁵¹

Muncul suatu kedilemaan dari *welfare state*. Di mana orang mungkin mengatakan dengan yakin akan tantangan bahwa *welfare state* telah gagal menciptakan suatu alokasi sumber daya yang efisien dan adil. Namun, di sisi lain kurang berpendapat bahwa hubungan pasar yang tidak terkekang akan menghasilkan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar tanpa *welfare state*. Jadi, meskipun mimpi 'masyarakat baik' yang divisualisasikan oleh *welfare state* tetap tidak terpenuhi, strateginya telah habis. Semua alat dalam lumbung pemikiran konsep sekarang telah dicoba seluruhnya, termasuk regulasi, nasionalisasi, gerakan buruh, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja penuh. Oleh karena itu "ada hilangnya kepercayaan yang meluas dalam kapasitas *welfare state* untuk memberikan pekerjaan penuh atau layanan kesejahteraan."⁵²

Namun, mengingat reaksi terhadap pajak, penurunan defisit tidak mungkin terjadi kecuali melalui pemotongan pengeluaran. Lobi-lobi yang kuat, dalam mengejar kepentingan para pengelola keuangan negara, tidak memungkinkan pemotongan yang mendalam dalam pertahanan dan pengeluaran sektor publik lainnya yang telah diberi prioritas maksimum untuk kepentingan 'nasional'. Oleh karena itu berbagai kebijakan sosial termasuk kompensasi pengangguran, upah minimum, bantuan medis, dan manfaat kesejahteraan lainnya sedang diperiksa ulang. Bentrokan yang dihasilkan antara kebijakan ekonomi dan sosial telah menempatkan *welfare state* dalam krisis.⁵³

⁵¹ Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*.

⁵² Umer Chapra, hlm. 132.

⁵³ Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*.

Welfare state bergerak dalam kerangka sekularis kapitalisme. Ia tidak memiliki mekanisme yang dapat dicapai untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas, atau untuk memotivasi individu dan kelompok pluralis untuk menahan klaim mereka konsisten dengan tuntutan makroekonomi, dan keseimbangan eksternal dan tujuan distributif masyarakat.⁵⁴

Di negara Swedia contohnya, yang memiliki catatan yang lebih baik untuk menyediakan layanan kesejahteraan. Memiliki masalah yang dihasilkan dari tingginya tingkat perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini secara luas diakui bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi mengecilkan hati pekerjaan, tabungan, dan inisiatif pribadi. Tingkat inflasi di Swedia saat ini lebih besar hingga dari dua kali lipat di negara-negara industri. Ini mengikis daya saing industrinya, mengurangi pangsa pasarnya, dan memperbesar defisit transaksi berjalannya. Ini terikat untuk menaikkan suku bunga dan lebih lanjut mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga menonjolkan masalah ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, ada tekanan publik untuk mengurangi tarif pajak. Tetapi tidak mungkin untuk mengurangi pajak tanpa pada saat yang sama mengurangi pengeluaran, atau defisit anggaran. Target termudah untuk menabung adalah pemotongan belanja kesejahteraan di seluruh papan seperti yang telah terjadi di negara lain. Oleh karena itu, dalam kerangka acuan sekuler, seruan untuk mengurangi tarif pajak pada dasarnya adalah sinyal untuk mengurangi peran kesejahteraan negara.⁵⁵

Welfare state telah memperburuk masalah lebih lanjut tanpa benar-benar menebus kondisi orang miskin. Untuk memperbaiki hasil kapitalisme yang tidak dapat diterima, *welfare state* telah menciptakan masalah lain yang sama-sama tidak terpecahkan. Alasan untuk ini adalah bahwa kebijakan *welfare state* pada dasarnya adalah solusi tambal sulam untuk filsafat kapitalisme sekuler dan sosial-darwinis.

⁵⁴ Umer Chapra.

⁵⁵ Umer Chapra, hlm. 133.

Tujuan kemanusiaan yang diakui *welfare state* secara diam-diam dan hedonis, serta darwinisme sosial di mana strateginya secara tidak sadar telah menciptakan masalah sosial-ekonomi yang menggoda dan membingungkan. Banyak perubahan kecil dan modifikasi yang dilakukan sejauh ini telah gagal melakukan hal itu. Penyesuaian tersebut memecahkan beberapa masalah tetapi menciptakan yang lain. Ada kebutuhan untuk restrukturisasi mendasar masyarakat dan ekonomi sedemikian rupa sehingga tujuan kemanusiaan *welfare state* dapat diaktualisasikan tanpa melebihi batas yang ditetapkan oleh ketersediaan sumber daya.⁵⁶

4. Relevansi Pandangan Konsep *Welfare State* Umer Chapra di Indonesia

Di Indonesia *welfare state* bisa dikiasikan dengan falsafah ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Falsafah ini ditaruh dalam nilai-nilai yang terkandung dalam dua dasar negara, yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 oleh para pendiri negara. Hubungannya dengan *welfare state*, ditemukan dua letak kalimat yang menjelaskan teori ini. Pertama, dalam UUD 1945 disebutkan “memajukan kesejahteraan umum”. Sementara di Pancasila, terletak di sila kelima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁵⁷ Jadi, Indonesia secara falsafah sudah menanam nilai *welfare state* pada tubuh ideologinya, meskipun pada praktiknya, ideologi ini belum bisa diterapkan.

Meskipun Indonesia sudah memiliki dasar ideologi dalam *welfare state*, ini belum membawa masyarakat kepada apa yang diharapkan. Dalam kondisinya, negara ini masih mengalami beberapa masalah besar. Di antaranya yang paling mencolok adalah kasus korupsi. Data yang ada menyebutkan bahwa pada tahun 2020 saja telah terjadi kasus korupsi sebanyak 1.298 orang terdakwa, dengan kerugian hingga Rp 56,7 triliun, itupun hanya Rp 8,9 triliun yang dikembalikan

⁵⁶ Umer Chapra, hlm. 136.

⁵⁷ Alfitri, “Ideologi *Welfare State* Dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): hlm. 458.

ke negara.⁵⁸ Kondisi ini mengingatkan kita dengan gagasan Chapra bahwa dalam *welfare state* terdapat nilai pendidikan Islami, serta worldview Islam yang tepat. Dalam hal ini, sebenarnya kita tau bahwa mereka para pejabat telah memiliki jenjang pendidikannya masing-masing yang tinggi. Namun, worldview yang mereka tanamkan belum berlandaskan asas nilai keislaman yang tepat. Sehingga masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.

Belum lagi dengan peran partai politik yang mestinya bisa menjadi motor di pemerintahan, justru tidak bisa diandalkan untuk menjadi sosok yang menjunjung tinggi ideologi negara. Krisis kepercayaan muncul dari masyarakat kepada partai politik lantaran banyak indikasi adanya kinerja buruk. Sehingga partai politik justru pula merusak tatanan hukum dan merusak demokrasi yang seharusnya dijalankan.⁵⁹ Dengan melihat kondisi ini sangat relevan dengan konsep *welfare state* Chapra, bahwa suatu negara haruslah menata tatanan lembaga pemerintahan dengan baik dan benar. Tentu nilai tanggung jawab seharusnya ada pada lembaga-lembaga tersebut.

Keadaan ekonomi negara dengan fenomena yang ada, jika diarahkan kepada hasil kritik Chapra terhadap *welfare state*, cukup terasa relevansinya. Ketika kemiskinan masih merajalela, kesenjangan sosial terus terjadi, di mana yang kaya terus kaya, dan yang miskin semakin miskin.⁶⁰ Ditambah dengan arus politik ekonomi Indonesia yang masih rapuh. Kebijakannya tidak konsisten, belum memberikan pengaruh intervensi yang baik. Angka-angka kemiskinan akhirnya masih belum dapat dituntaskan, bahkan kian terjadi kedalaman dan keluasan.⁶¹ Sehingga dari sini terlihat bagaimana kritik ini masih terasa sangat relevan, dan

⁵⁸ Tatang Guritno, "Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti Dari Koruptor Rp 8,9 Triliun," KOMPAS, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>.

⁵⁹ Roselina Effendi, "Konsep Welfare State Di Indonesia," hlm. 178.

⁶⁰ Dedy Darmawan Nasution, "Angka Kemiskinan Di Indonesia Melonjak," REPUBLIKA, 2020, <https://republika.co.id/berita/qdi2j7383/angka-kemiskinan-di-indonesia-melonjak>.

⁶¹ Mahaji Noesa, "Politik Ekonomi Indonesia Masih Rapuh," Kompasiana, 2018, <https://www.kompasiana.com/mahajinoesa/5a509a84ab12ae11b05beaa2/politik-ekonomi-indonesia-masih-rapuh>.

menunjukkan kemiripan dengan hal yang terjadi pada negara-negara penganut kapitalis dan sosialis.

E. Simpulan

Kritik Umer Chapra terhadap *welfare state* telah memberikan kesadaran yang mendalam bagi para akademisi di bidang ekonomi. Banyak sekali poin dalam kritiknya yang dapat dipahami melalui data hasil penelitiannya di negara-negara besar. Namun, di antara poin kritiknya yang paling mencolok adalah beberapa hal berikut: ketidakadilan sistem, arti kemanusiaan yang salah, kesenjangan antara orang kaya dan miskin yang masih berkelanjutan, kasus kejahatan, narkoba, dan keputusan yang melanda, kedilemaan, hilangnya kepercayaan yang meluas terhadap *welfare state*, dan kebijakan *welfare state* yang hanya bersifat tamal sulam dari sistem sebelumnya yakni kapitalis.

Kritik-kritik ini sangat membantu para akademisi maupun praktisi ekonomi Islam. Ini karena kritik-kritik tersebut sangat komprehensif, syamil, memberikan pencerahan, relevan dengan zaman sekarang, dan uniknya, Chapra tetap masih menghargai hasil dari pada pemikiran-pemikiran kapitalis, maupun sosialis dengan menyebutkan beberapa kelebihanannya. Adapun apabila kritik-kritik ini diarahkan kepada keadaan ekonomi negara Indonesia, terdapat beberapa relevansi antara keduanya.

Ketika kemiskinan masih merajalela, kesenjangan sosial masih terjadi, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin susah. Begitu pula dengan arus politik ekonomi Indonesia yang masih rapuh. Kebijakannya tidak konsisten, belum memberikan pengaruh intervensi yang baik. Angka-angka kemiskinan akhirnya masih belum dapat dituntaskan, bahkan kian terjadi kedalaman dan keluasan. Sehingga dari sini terlihat bagaimana kritik ini masih terasa sangat relevan, dan menunjukkan kesamaan dengan beberapa fenomena di berbagai negara penganut kapitalis dan sosialis.

F. Daftar Pustaka

Alfitri. "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012).

Kritik Umer Chapra Terhadap Welfare State _____

- Aryu Inayati, Anindya. "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra." *Profetika, Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 164–76.
- Darmawan Nasution, Dedy. "Angka Kemiskinan Di Indonesia Melonjak." *REPUBLIKA*, 2020. <https://republika.co.id/berita/qdi2j7383/angka-kemiskinan-di-indonesia-melonjak>.
- Fuadi, Ariza, and Purbayu Budi Santosa. "EKONOMI ISLAM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 12, no. 1 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jdeb.v12i1.255>.
- Guritno, Tatang. "Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti Dari Koruptor Rp 8,9 Triliun." *KOMPAS*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi U.G.M., 1984.
- Hanif, Muh. "Sertifikasi Guru; Ideologi Kapitalisme Dan Welfare State." *Insania* 17, no. 1 (2012): 35–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/insania.v17i1.1486>.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. *Buku Hitam Putih Ekonomi Islam*. Edited by Muhammad Yusuf Ibrahim and Rendra Fahrurrozie. Bandung: Gulali Edukasi Indonesia, 2021.
- Inayati, Anindya Aryu. "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra." *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2013): 1–18.
- Kambali, Muhammad. "Paradigma Sistem Kapitalisme Dan Islam Tentang Welfare State." *JES, Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2019): 16–17.
- Mulyadi, Dedi. "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisis Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, Dan Negara Sejahtera)." *'Adliya* 10, no. 2 (2016): 168–80.
- Noesa, Mahaji. "Politik Ekonomi Indonesia Masih Rapuh." *Kompasiana*, 2018. <https://www.kompasiana.com/mahajinoesa/5a509a84ab12ae11b05beaa2/politik-ekonomi-indonesia-masih-rapuh>.
- Ridha, Muhammad. "Inflasi Dalam Pandangan Umer Chapra." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7028>.
- Ridha, Muhammad, and Muhammad Yafiz. "Inflasi Berdasarkan Pandangan M. Umer Chapra." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 114. <https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4089>.
- Roselina Effendi, Winda. "Konsep Welfare State Di Indonesia." *Trias Politika* 1, no. 1 (2017): 171–83.
- Umar Chapra, Muhammad. *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy*.

*Khoirul Umam
Achmad Jalaludin*

Leicester: The Islamic Foundation, n.d.

Umer Chapra, Muhammad. *Islam and the Economic Challenge*. Riyadh: International Islamic Publishing House, 1995.

Zaki Su'aidi, Mohammad. "Pemikiran m. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam." *Ishraqi* 10, no. 156 (2012): 1–19.